



**UPAYA PAKISTAN MEREBut DUKUNGAN RAKYAT KASHMIR
MELALUI SUBVERSI**

(Pakistan's Efforts to Seize the Support of Kashmir Through Subversion)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Herlambang Putri Utami
NIM 080910101063**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sutarti dan Ayahanda Alm.Hadi Purnomo tercinta, yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Untuk suamiku Jefni Andrian sertaanakku Muhammad RafkyParsa Ramadhan yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tugs akhir ini;
3. Guru-guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikam ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
5. Serta teman-temanku tercinta Arini Dina, Silvia Andromeda, Anisatus Zaskia dan Wisma Gita

MOTTO

Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini.¹

(H.R. Bukhari)

“Hidup yang tak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan.”

(Dari surat Kartini pada Stella M. Zeehandelaar)

¹ <https://bukharimuslim.wordpress.com/>

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : HerlambangPutriUtami

NIM : 080910101063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :**Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir melalui Subversi** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2015

Yang menyatakan,

HerlambangPutriUtami

NIM 080910101063

SKRIPSI

**UPAYA PAKISTAN MEREBut DUKUNGAN RAKYAT KASHMIR
MELALUI SUBVERSI
(PAKISTAN'S EFFORT TO SEIZE THE SUPORT OF KASHMIR
THROUGH SUBVERSION)**

Oleh
Herlambang Putri Utami
NIM 080910101063

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP. 196810221993031002

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP.196305261989022001

RINGKASAN

Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir Melalui Subversi; Herlambang Putri Utami, 080910101063, 2015: 80 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Problema Kashmir bermula ketika Inggris meninggalkan India pada tahun 1947. Masyarakat Muslim di anakbenua India membangun negara sendiri, lepas dari India yang didominasi Hindu. Berbagai wilayah yang didominasi Muslim menggabungkan diri dalam Pakistan, sedang daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim menggabungkan diri dalam negara India. Namun persoalan muncul terkait wilayah Kashmir yang mayoritas penduduk Muslim tetapi rajanya beragama Hindu. Hari Singh raja Kashmir yang saat itu berkuasa menggabungkan Kashmir dalam wilayah India. Keputusan Hari Singh bergabung pada India pada akhirnya menimbulkan konflik antara Pakistan dan India. Kedua belah pihak merasa berhak atas wilayah Kashmir. India berusaha mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya, sedang Pakistan berupaya merebut Kashmir dari India dan menjadikannya bagian dari wilayah Pakistan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data. Tehnik pengumpulan data adalah studi pustaka (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Pakistan melakukan subversi dalam konflik Kashmir adalah untuk merebut dukungan rakyat Kashmir sehingga ketika kelak PBB menepati janjinya melaksanakan plebisit rakyat Kashmir akan memilih bergabung dengan Pakistan dari pada dengan India atau memilih merdeka. Upaya subversi tersebut dilakukan dengan 2 cara yakni propaganda sistematis (non -violent) dan tindakan sistematis (violent). Hasil dari upaya subversi Pakistan menghasilkan output yakni tumbuh gerakan perlawanan rakyat Kashmir terhadap India yang secara agresif melakukan pemberontakan terhadap India.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahNya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pakistan Merebut Kashmir dari India melalui Subversi” ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari segala keterbatasan yang dimiliki, sehingga memerlukan bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang menyediakan waktu dan segenap kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan karya ini. Tanpa bimbingan mereka berdua, penulis bakal kesulitan mencari jalan keluar dari setiap persoalan dalam pengerjaan karya ini
2. Fuat Albayumi, S.IP, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
3. Seluruh jajaran Dosen dan operator Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta bantuan kepada penulis dalam berbagai bentuk selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Sutarti dan (alm) Hadi Purnomo adalah dua nama yang meletakkan cita-cita pendidikan dalam diri penulis. Mereka berdua yang mengantarkan penulis ke jalan pengetahuan yang sulit untuk dimasuki, namun ternyata lebih sulit lagi untuk ditinggalkan. Atas ketekunan, perjuangan, kasih sayang dan doa mereka berdua, mulai belajar mengenal dunia hingga

sekarang, penulis haturkan terima kasih. Mereka berdua dua orang yang penulis panggil dengan ibu dan bapak

5. Suamiku tercinta Jefni Andrian dan anakku Muhammad Rafky Parsa Ramadhan yang menjadi semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana.
6. Saudaraku Nody Arizona dan Pipit Eka Puspita yang bersama-sama berusaha mewujudkan cita-cita sederhana ibu dan bapak.
7. Ibu mertuaku Munawaroh serta kakak iparku Saiful Amin dan Sri Wahyuningsih yang bersedia memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat sahabat penulis Arini Dina, Silvia Andromeda, Anisatus Zakiyah, Maruf Ikrar, Fradana Anantara, Firman Syarif, Mahardy, Zuher Efendi, Khairul Anam serta kawan-kawan sejawat HI angkatan '08 yang turut membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun secara dukungan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Untuk saudara saudaraku di UKMF WISMAGITA yang telah memberi banyak ilmu berorganisasi selama penulis menjadi mahasiswa;
10. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satupersatu atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Jember, 19 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.2.1 Batasan Materi	4
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.6 Argument Utama	7
1.7 Metode Penelitian	8
1.7.1 Metode Pengumpulan data	9
1.7.2 Metode Analisis Data.....	9
1.8 Sistematika Penulisan	10

BAB 2. GAMBARAN KONFLIK INDIA PAKISTAN	11
2.1 Berdirinya Negara India	11
2.1.1 Sejarah India Kuno	11
2.1.2 Sejarah India Modern	16
2.2 Terbentuknya Negara Pakistan	20
2.3 Bergabungnya Kashmir dalam India	27
2.3.1 Gambaran Umum Kashmir	27
2.3.2 Latar Belakang Timbulnya Konflik antara India dan Pakistan	28
BAB 3. KONDISI MASYARAKAT KASHMIR DI BAWAH PEMERINTAH INDIA	33
3.1 Tindak Represif Pemerintah India Terhadap Masyarakat Kahmir	33
3.2 Perekonomian Kashmir Di Bawah Pemerintah India	38
3.3 Kehidupan Sosial Masyarakat Kashmir Di Bawah Pemerintah India	40
BAB 4. STRATEGI TINDAKAN SISTEMATIK PAKISTAN UNTUK MEREKUT KASHMIR	44
4.1 Strategi Tindakan Sistemik Pakistan Untuk Merebut Kashmir	44
4.1.1 Provokasi militer Pakistan terhadap India.....	44

4.1.2 Bantuan dana dan senjata Pakistan kepada kelompok militer.....	49
4.2 Strategi propaganda Sistematis Pakistan Untuk Merebut Kashmir.....	55
4.2.1 Pendidikan.....	56
4.2.2 Media massa.....	61
4.2.3 Media hiburan.....	65
4.3 Upaya Diplomasi Pakistan	69
4.3.1 Upaya diplomasi dengan India.....	69
4.3.2 Peran PBB dalam resolusi konflik Kashmir.....	71
BAB 5. KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Peta Kekuasaan Dinasti Gupta	12
2.2 Peta Kekuasaan Dinasti Kalji	13
2.3 Peta Kekuasaan Dinasti Tughlak	14
2.4 Peta Kekuasaan Dinasti Lodi	15
2.5 Peta Kekuasaan Dinasti Mughal	16
2.6 Peta India Sebelum dan Sesudah Partisi	27
4.1 Peta lokasi perang Kargil	46
4.2 Lambang Organisasi teroris Lashkar-e-Taiba (LeT) yang di dukung Pakistan	52
4.3 Buku Pelajaran tentang Sejarah Pakistan yang mengajarkan semangat anti India	60
4.4 Headline koran Dawn edisi 17 Desember 1971	62
4.5 Film Slumdog Millionaire yang kontroversial	67
4.6 film “Waar” yang dituduh anti India	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Kekerasan Aparat India Terhadap Masyarakat Kashmir	35
3.2 Presentase Populasi di bawah garis kemiskinan untuk daerah Pedesaan dan perkotaan di India	39
4.1 Daftar Kelompok kelompok yang melawan India	51
4.2 Jumlah bantuan keuangan ISI kepada sejumlah kelompok militant	53
4.3 Gaji anggota militan dan lainnya yang terlibat	54

Daftar Singkatan



LoC	: Line of Control
JKLF	: Jammu Kashmir Liberation Front
PBB	: Peserikatan Bangsa Bangsa
ICG	: International Crisis Group
CRSS	: Center for Research and Security Studies
ISI	: Inter Service Intelligence
CBM	: Confidence Building Measure
POK	: Pakistan Occupied Kashmir
RAW	: Research and Analysis Wing
LeT	: Lashkar-e-Taiba
JKCHR	: Jammu and Kashmir Council for Human Right
FIDH	: Federation Internationale des Ligue des Drpits de l'Homme
PHR	: Physicians for Human Right
UNCIP	: the United Nations Commision for India and Pakistan
BSF	: Border Security Force
UNMOGIP	: United Nations Militiary Observer Group in India and Pakistan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kashmir selalu menjadi pemicu konflik dalam hubungan India dan Pakistan. Kedua negara tersebut sejak mereka merdeka hingga saat ini terlibat konflik. Perebutan wilayah Kashmir muncul sejak 1947 ketika Inggris hendak meninggalkan wilayah tersebut. Pemerintahan Inggris yang diwakili oleh Lord Mounbatten memberikan opsi kepada bekas wilayah jajahannya di kerajaan Hindustan yaitu wilayah Kashmir untuk memilih bergabung ke India atau ke Pakistan. Pada fase ini muncul sebuah pertentangan internal dari penduduk dan raja Kashmir dimana raja yang beragama Hindu memutuskan untuk bergabung dengan India, sedangkan rakyat Kashmir yang mayoritas beragama Islam ingin bergabung dengan Pakistan.²

India secara sepihak melakukan klaim kepemilikan atas Kashmir karena raja yang beragama Hindu memilih untuk bergabung dengan India. Klaim yang dilakukan India mendapat penolakan Pakistan dengan anggapan Kashmir mayoritas berpenduduk Islam oleh karenanya menjadi bagian teritori Pakistan sebagaimana negara Islam. Perebutan wilayah antara India dan Pakistan terkait Kashmir menyebabkan terjadinya perang terbuka pada tahun 1947, 1965 dan 1972.

Perang antara India dan Pakistan pada 1947 berhasil diredakan dengan Resolusi PBB no 47 tahun 1948 yang mengamanatkan diselenggarakannya plebisit di wilayah Kashmir, kemudian 1949 dibentuk *Line of Control* (LoC). India menolak plebisit tersebut dan pada 1951 menawarkan pemilihan umum lembaga legislatif di Kashmir. Lembaga legislatif yang terpilih menyetujui Kashmir menjadi bagian dari India pada 6 Februari tahun 1956.

Gagalnya plebisit dan integrasi Kashmir ke Pakistan memicu pecahnya perang terbuka India dan Pakistan tahun 1965 yang diredakan dengan resolusi

²Suyani Indriastuti. 2008. Kompleksitas Konflik Kashmir India dan Pakistan. *Jurnal Sosial Budaya dan Politik*, 2 (7):Universitas Jember. Hal.911

PBB. India dan Pakistan kembali terlibat dalam perang terbuka tahun 1972 yang berhasil dihentikan dengan perjanjian Simla antara India dan Pakistan. Dalam perjanjian Simla, India dan Pakistan menyepakati pembagian Kashmir menjadi dua bagian, yaitu sepertiga bagian dikuasai Pakistan kemudian disebut Azad Kashmir dan dua pertiga bagian dikuasai India yang kemudian disebut Jammu Kashmir.³

Permasalahan antara India dan Pakistan tidak selesai melalui perjanjian Simla. Faktor agama menjadi pemicu konflik keduanya. Sikap diskriminatif pemerintah India terhadap masyarakat muslim Kashmir telah mengungkit kembali perpanjangan deretan konflik di kemudian hari. Masyarakat Islam Kashmir yang merasa tertindas membentuk kelompok militan yang secara aktif memberontak kepada pemerintah India. Pakistan yang merasa memiliki kepentingan atas Kashmir ikut terlibat dalam mendukung aktivitas kelompok militan tersebut.⁴

Ita Mutiara dalam tulisannya yang berjudul *Dilema Masalah Kashmir dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan* menyebut kelompok-kelompok pemberontak Kashmir terbagi atas 3 kelompok, yaitu:⁵

- 1 Kelompok-kelompok yang berkeinginan merdeka terutama kelompok JKLF (*Jammu-Kashmir Liberation Front*), kelompok tersebut berupaya mendirikan negara yang merdeka di bawah pemerintahan yang sekuler.
- 2 Kelompok yang berkeinginan untuk bergabung dengan Pakistan atau merupakan bagian dari negara muslim Pakistan. Kelompok yang pro Pakistan ini berkaitan erat dengan Jama'at Islamiyat Pakistan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah: Hizb-ul Mujahideen, Al jehad, Al Baraq, Ikhwan Ul-Musalmeen dan Al Umar Muhajideen.
- 3 Kelompok yang secara eksplisit Pro-Pakistan yaitu *Jammu and Kashmir People's League*.

³*Ibid.* Hal.912

⁴*ibid.* Hal.913

⁵Ita Mutiara. 2006. *Dilema masalah Kashmir dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan: Mozaik volume.1.* Hal.7

Kelompok-kelompok pemberontak tersebut melakukan teror terhadap pemerintah India dengan melakukan penculikan politikus dan penduduk sipil bahkan mereka melakukan pembunuhan. Tindakan tersebut bertujuan agar pemerintah India melepaskan anggota kelompok pemberontak yang ditawan, juga sebagai sarana mengumpulkan uang untuk mendanai aktivitas perlawanan mereka.

Di sisi lain Pakistan menganggap Kashmir merupakan simbol perlindungan terhadap hak-hak kaum muslim sehingga Pakistan terus memberikan dukungan bagi aktivitas kelompok militan tersebut.⁶ Bentuk dukungan yang diberikan Pakistan terhadap kelompok militan tersebut antara lain dukungan keuangan, pelatihan, peralatan dan persenjataan militer. Pemerintah India menanggapi serius aktivitas kelompok militan dan campur tangan Pakistan tersebut dengan cara meningkatkan kekuatan militer di Kashmir serta di daerah perbatasan.

India dan Pakistan menginginkan wilayah Kashmir menjadi bagian dari teritori negaranya. Hal tersebut menyebabkan munculnya persaingan kekuatan militer antara India dan Pakistan. India yang saat ini memegang hak atas wilayah Kashmir merasa perlu untuk melindungi wilayah Kashmir dari ancaman Pakistan yang secara agresif hendak merebut Kashmir dari India secara militer.

Pakistan menempuh berbagai upaya untuk menjadikan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya, selain secara militer juga melalui jalur diplomasi. Diplomasi dilakukan melalui berbagai macam perundingan yang melibatkan organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan ICG (*Internastional Crisis Group*) sebagai mediator yang memfasilitasi terjadinya resolusi konflik.

Konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan sangat menarik untuk dikaji mengingat masuknya Kashmir ke dalam India mendapat penolakan dari masyarakat Kashmir yang menginginkan untuk bergabung dengan Pakistan. Keinginan tersebut berbanding lurus dengan keinginan Pakistan menjadikan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya. Pemerintah Pakistan terus berupaya untuk merebut simpati masyarakat Kashmir agar kelak ketika Plebisit

⁶Lihat Suyani Indriastuti, *op. cit.*, hal.913

benar benar dilaksanakan masyarakat Kashmir memilih bergabung dengan Pakistan. Demi tercapainya upaya tersebut pemerintah Pakistan memberikan bantuan kepada masyarakat Kashmir untuk membebaskan diri dari India dan pemberian bantuan tersebut semakin memperuncing rivalitas India-Pakistan.

Dari latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk menulis karya ilmiah skripsi dengan judul:

“Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir Melalui Subversi”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Penulisan karya ilmiah ini Penulis melingkupi kajian ini dengan batasan materi dan batasan waktu. Adapun batasan materi dan batasan waktu adalah sebagai berikut:

1.2.1 Batasan Materi

Dalam karya ilmiah ini penulis memfokuskan penelitian terhadap konflik perebutan wilayah Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan. Dari judul “Upaya Pakistan Merebut Dukungan Rakyat Kashmir Melalui Subversi”, penulis memberi batasan pengertian dari judul tersebut.

Pakistan merupakan anak negara benua India, yang berasal dari pembagian wilayah negara India pada tahun 1947. Dalam karya ilmiah ini penulis mengkaji mengenai politik pemerintahan Pakistan, yang meliputi segala tindakan atau ucapan yang mewakili sikap dari pemerintah Pakistan. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya Pakistan adalah cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah Pakistan dalam rangka merebut Kashmir dari India, cara-cara tersebut dapat melalui tindakan yang sifatnya *non-violence* atau yang melibatkan aksi militer (*violence*). Kashmir yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah sebuah wilayah yang menjadi bagian dari India yang letaknya berbatasan dengan Pakistan. Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam ingin bergabung dengan Pakistan namun rajanya yang beragama hindu menghendaki Kashmir menjadi bagian dari India sehingga Kashmir sampai saat ini menjadi pemicu konflik hubungan India dan Pakistan. Subversi yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah segala

tindakan yang dilakukan oleh pihak asing terhadap masyarakat tertentu dengan tujuan mengurangi legitimasi pemerintah melalui propaganda.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang dimaksud di sini adalah mengenai rentang waktu mulai kapan dan sampai kapan materi kajian ini berlangsung. Batasan waktu yang diambil oleh penulis adalah tahun 1989 sampai tahun 2013. Tahun 1989 dipilih sebagai titik awal batasan waktu karena pada tahun tersebut kelompok-kelompok militan berkembang dengan pesat dan terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Kashmir terhadap pemerintah India, dan menjadi tonggak awal keterlibatan Pakistan dalam gerakan kelompok militan Kashmir. Dan tahun berikutnya hingga 2013 dipilih karena hingga sekarang upaya-upaya Pakistan untuk merebut Kashmir masih terus dilakukan secara intensif.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh penulis adalah:

“Bagaimana upaya Pakistan merebut dukungan rakyat Kashmir melalui subversi?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat ditentukan oleh masalah yang diajukan dan inti dari tujuan penelitian berisi tentang kontribusi hasil penelitian bagi kepentingan keilmuan atau kepentingan yang bersifat praktis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pakistan merebut dukungan rakyat Kashmir melalui subversi dan sejauh mana keberhasilan subvesi tersebut.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam membahas Upaya Pakistan Merebut Dukungan Masyarakat Kashmir Melalui Subversi, maka konsep yang digunakan untuk menganalisa masalah ini adalah dengan menggunakan konsep subversi.

Subversi dapat diartikan sebagai propaganda yang dilakukan secara terbuka yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar (asing) di mana terkait dengan tindakan sistematis untuk membantu kelompok-kelompok pemberontak pribumi dalam rangka memperoleh kekuasaan. Subversi pemberontakan biasa, adalah tindakan subversi yang diorganisasikan, didukung oleh dan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing, dilakukan demi kepentingan negara asing tersebut dengan cara memanfaatkan unsur ketidakpuasan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.⁷

Tindakan Subversi dapat dilakukan melalui 2 cara, yang pertama melalui propaganda yang dilakukan secara sistematis (*non-violence*) dan yang kedua tindakan sistematis (*violence*). Propaganda sistematis biasanya meliputi upaya mempengaruhi masyarakat melalui kalimat, pamflet, pembuatan film, orasi dsb. Dikatakan *non-violence* karena propaganda ini tidak menggunakan unsur kekerasan. Sedangkan tindakan sistematis dapat terwujud dengan memberi dukungan kepada kelompok pemberontak, di mana bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa dukungan keuangan yang mendanai tindakan pemberontakan, pemberian senjata pada kelompok pemberontak, atau bahkan memberi pelatihan militer kepada kelompok pemberontak guna melawan kekuatan pemerintah yang berkuasa dan tindakan ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai instrumen utamanya.

Bentuk propaganda sistematis yang dilakukan oleh Pakistan antara lain adalah dengan menghimpun gerakan anti-Hindu dan anti-India, menyebarkan tindakan diskriminatif pemerintah India terhadap muslim Kashmir dan menggalang dukungan dari negara-negara Islam diseluruh dunia. Sedangkan bentuk tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pakistan adalah dengan memberikan dukungan berupa bantuan dana, pasokan senjata, pelatihan militer kepada kelompok militan serta memfasilitasi dan membantu kelompok militan untuk menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah Kashmir yang berada di bawah pemerintahan India.

⁷Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal .240

Dalam konflik Kashmir ini, Pakistan memanfaatkan unsur ketidakpuasan masyarakat Kashmir akan tindakan diskriminatif pemerintahan India yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tindakan diskriminatif tersebut menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat Kashmir terhadap pemerintah India, kebencian tersebut mengakibatkan munculnya gerakan pemberontakan oleh masyarakat Kashmir untuk melawan Pemerintah India. Pakistan yang berbatasan langsung dengan Kashmir dan merupakan negara Islam merasa perlu untuk melindungi masyarakat Islam Kashmir dari tindakan diskriminatif India, untuk itu Pakistan mendukung gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak tersebut. Selain dukungan moral yang diberikan oleh pemerintah Pakistan terhadap masyarakat Kashmir, Pakistan juga memberikan bantuan senjata, pelatihan militer dan dana untuk para kelompok militan Kashmir. Dukungan Pakistan terhadap perjuangan rakyat Kashmir untuk memperoleh kemerdekaan dimaksudkan untuk menarik simpati serta dukungan dari masyarakat Kashmir sehingga ketika suatu saat plebisit terjadi masyarakat lebih memilih bergabung dengan Pakistan daripada dengan India.

Pakistan memanfaatkan unsur ketidakpuasan masyarakat Islam Kashmir terhadap pemerintah India dengan baik, masyarakat Kashmir yang tidak puas tersebut pada akhirnya ingin melepaskan diri dari India dan beberapa kelompok militan menginginkan Kashmir untuk bergabung sebagai bagian dari negara Pakistan.

1.6 Argumen Utama

Konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan masih saja belum terselesaikan. Pakistan melakukan serangkaian upaya untuk merebut dukungan masyarakat Kashmir agar mereka lebih memilih bergabung dengan Pakistan daripada India, Upaya yang dilakukan oleh Pakistan untuk merebut Kashmir dari India dilakukan melalui dua cara, yakni:

- 1 Propaganda sistematis (*non-violent*)

Propaganda sistematis dilakukan melalui kalimat, pamflet, pembuatan film, orasi dsb, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat Kashmir

agar anti terhadap pemerintah India dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah India serta bertujuan untuk menggalang dukungan dari lokal Kashmir dan internasional agar Kashmir masuk dalam wilayah Pakistan.

2 Tindakan sistematis (*violent*)

Tindakan sistematis yang dilakukan oleh Pakistan terkait masalah Kashmir dapat berupa aksi militer. Pakistan memberi bantuan dana, senjata, dan pelatihan militer terhadap kelompok pemberontak Kashmir untuk berperang melawan pemerintah India.

Dalam upaya merebut Kashmir dari India, pemerintah Pakistan juga menempuh jalur diplomasi. Upaya diplomasi tersebut dilakukan melalui 2 cara, pertama yakni pertemuan Pemerintah Pakistan dengan Pemerintah India dan kedua upaya diplomasi melalui pihak ketiga yakni PBB. Upaya diplomasi ditujukan guna memperoleh kesepakatan melalui cara damai.

Dalam upaya merebut dukungan rakyat Kashmir, Pakistan telah berhasil memperoleh simpati dari rakyat Kashmir. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa kelompok militan yang memperjuangkan kebebasan Kashmir atas India menginginkan Kashmir masuk menjadi bagian wilayah integral Pakistan.

1.7 Metode Penelitian

Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok, yaitu ingin menjelaskan fenomena. Dalam memahami fenomena tersebut, penulis menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lain melalui metode tertentu. Metode tersebut meliputi pengumpulan data dan analisis data. Dengan diterapkannya suatu metode, akan diperoleh kerangka konseptual dan data-data yang dibutuhkan secara memadai sehingga karya tulis ilmiah memiliki nilai yang tinggi. Penulis menggunakan kerangka konseptual untuk melihat persoalan yang perlu diteliti. Bertolak dari konseptual itulah penulis ingin membuktikan dengan menggunakan metode berfikir deduktif untuk itulah pada bab berikutnya yakni pada bab

pembahasan penulis akan membahas secara deskriptif berdasarkan kerangka konseptual.

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan dua langkah metodologis, yaitu :

1.6.1 Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode studi literatur, sehingga data-data yang dihasilkan adalah merupakan data sekunder. Dalam hal ini, langkah yang diambil adalah melengkapi literatur yang relevan dengan tujuan penulisan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku ilmiah, jurnal, situs-situs internet dan sumber-sumber lain. Beberapa pusat informasi yang menjadi rujukan antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Koleksi Pribadi
4. Koran, Majalah dan Jurnal, serta
5. Situs atau *website* internet

1.6.2 Metode analisis data

Untuk mendapat hasil penelitian yang baik, harus menggunakan proses berfikir yang baik pula. Tahap analisi data ditujukan untuk mendapat kesimpulan yang obyektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis dedukti.⁸ Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh tidak dapat diukur secara statistik-sistematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara *real* dan apa adanya. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian, peneliti harus mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap perspektif teoritis yang digunakan, sehingga nantinya dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat membuktikan argument utama yang ada.

⁸ Kartini Kartomo. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung : Mandar mau.

Dalam penulisan skripsi ini, mayoritas data sekunder yang digunakan berupa data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan dan ideology seseorang, yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan analisis itulah, kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan dan akan memuat poin-poin yang menjelaskan maksud penulis dalam mengangkat sebuah tema, antara lain: latar belakang, lingkup pembahasan, rumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, metode analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai gambaran umum konflik antara India dan Pakistan.

BAB III membahas mengenai kondisi masyarakat Kashmir dibawah pemerintah India

BAB IV akan membahas mengenai upaya subversi Pakistan terhadap Kashmir.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB 2. GAMBARAN KONFLIK INDIA-PAKISTAN

2.1 Berdirinya Negara India

India adalah sebuah negara yang berada di Asia Selatan dengan luas wilayah 3.287.590 km². Secara geografis India terletak di sebelah selatan Pegunungan Himalaya. Sebelah utara berbatasan dengan Nepal, Bhutan dan China, Sebelah timur berbatasan dengan Bagladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala. Sebelah selatan berbatasan dengan Srilanka dan Samudra Hindia, sedangkan Sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Secara Astronomi India terletak di pada 8° LU - 37° dan BT-97° BT.⁹

Untuk mempermudah penjelasan mengenai berdirinya negara India, penulis akan membagi pembahasan mengenai berdirinya negara India menjadi sejarah India kuno dan sejarah India modern.

2.1.1 Sejarah India Kuno

Nama India sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu wilayah luas yang sekitarnya digenangi oleh sungai Indus, semenjak itu penduduk dan tempat itu disebut India.¹⁰ Penduduk asli India adalah bangsa Gond yang kemudian menyingkir ke hutan karena terdesak oleh bangsa Dravida. Namun bangsa Dravida pun akhirnya terdesak ke selatan oleh kedatangan bangsa Arya sekitar tahun 1500 SM. Bangsa Arya yang berasal dari benua Eropa tepatnya dari Austria-Hungary dan Bohemia. Bangsa Arya masuk ke India dari arah Selatan Laut Hitam yang selanjutnya mereka berusaha masuk dan menetap di India dan lama-kelamaan mereka mampu menguasai seluruh dataran rendah sungai Indus dan Gangga. Setelah menduduki wilayah tersebut mereka menamakan daerah yang mereka tempati dengan sebutan Aryavarta yang berarti tanah bangsa Arya, atau Hindustan yang berarti negeri orang Hindu.¹¹

⁹<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3454.htm> Di Akses tanggal 6 November 2012

¹⁰ Tuti Nuriah. 1990. *Asia Selatan Dalam Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal.2.

¹¹*Ibid.* Hal.8.

Agama Hindu berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di India, selanjutnya di ikuti oleh agama Budha, Jain dan Sikh. Pesatnya perkembangan agama Hindu tidak lepas dari keberhasilan dinasti Gupta. Dinasti Gupta berdiri tahun 317M dibawah kepemimpinan Chandra Gupta.¹² Dinasti Gupta mencapai masa kejayaannya dibawah pimpinan Samudra Gupta (330-380 M), dibawah kepemimpinannya Samudra Gupta berhasil mewujudkan *digvijaya*, yaitu penahlukan empat penjuru mata angin. Empat penjuru mata angina yang dimaksud antara lain Bengala Timur, Samatala, Kamarupa (Asam) dan Nepal. Dalam waktu yang relatif singkat seluruh daerah India utara yang berbatasan sebelah selatan sampai ke Narbada dan sebelah barat sampai sungai Jumna dan sungai Chambal berhasil dipersatukan.¹³

Gambar 2.1 Peta kekuasaan Dinasti Gupta



Sumber: "Indian Dynasties," dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

Pada abad ke 8 agama Islam mulai memasuki India. Agama Islam masuk ke India melalui saudagar-saudagar Islam yang berdagang di India. Para saudagar Islam dapat diterima oleh masyarakat India karena sikap mereka yang santun dan

¹²*Ibid.* Hal. 23

¹³*Ibid.* Hal 25

bersahabat dengan masyarakat India. Kedatangan Islam membawa angin segar kepada masyarakat Hindu yang mulai jenuh dengan sistem kasta, sebagian masyarakat India memilih berpindah agama untuk menghindari sistem Kasta yang ada dalam agama Hindu.

Pengaruh agama Islam paling terlihat di India sebelah barat, di wilayah tersebut banyak penganut agama Islam. Islam berkembang dengan pesat seiring munculnya dinasti Islam yang menguasai India, adapun dinasti tersebut antara lain:

1. Dinasti Kalji atau Khilji (1201-1390)

Dinasti Kalji di dirikan oleh Jallaludin Kalji. Dinasti Kalji berhasil menguasai India bagian utara, yang meliputi Gujarat, Malwa, Ujjain.¹⁴

Gambar 1.1 Peta Kekuasaan Dinasti Kalji atau Khilji



Sumber: "Indian Dynasties," dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

2. Dinasti Tughlak (1321-1388)

¹⁴Lihat "Indian Dynasties" Dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

Dinasti Tughlak atau Tuqlaq berdiri tahun 1321 dibawah pimpinan Gyasuddin Malik dan berhasil menyingkirkan dinasti sebelumnya yakni Kalji. Dibawah pemerintahan dinasti Tughlak, kesultanan Delhi mencapai puncak kebesarannya.¹⁵Fizuz Syah salah satu raja dari dinasti Tughlak yang berjasa membangun kesultanan Delhi dan pengembangan agama Islam di India.

Gambar 2.2 Kekuasaan Dinastu Tughlak



Sumber: "Indian Dynasties," dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

3. Dinasti Lodi (1451-1526)

Dinasti Lodi atau Lodhi merupakan dinasti yang muncul setelah berhasil mengalahkan dinasti Sayyid dengan rajanya yang terkenal yakni Ibrahim Lodi.¹⁶ Pemerintahan dinasti Lodi berada di pusat India yakni Delhi dan Punjab.¹⁷

Gambar 2.3 Kekuasaan Dinasti Lodi

¹⁵*Op.Cit.*Tuti Nuriah.Hal 35

¹⁶*Ibid.*Hal 36

¹⁷Lihat "Indian Dynasties" *Log.Cit.*,



Sumber: "Indian Dynasties," dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

4. Dinasti Moghul atau Mughal (1526-1858)

Dinasti Mogul di dirikan oleh Zahiruddin Mohammed Babur.¹⁸ Pada 1519 berhasil mengalahkan dinasti serta berhasil merebut kota Kabul dan menjadikannya sebagai basis kota pertahanan. Pada tahun 1524, Babur berhasil memperluas wilayahnya sampe Lahore .¹⁹ Dinasti Moghul berdiri secara resmi pada 1526 dengan Babur sebagai raja pertamanya.

Dinasti Moghul memiliki kekuasaan yang luas, mulai dari Kabul hingga Asam dan Kasmir hingga Tanjore.²⁰

Gambar 2.4 Kekuasaan Dinati Moghul atau Mughal

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Op.Cit.*Tuti Nuriah.Hal37

²⁰Lihat "Indian Dinasties" *Log.Cit.*,



Sumber: "Indian Dynasties," dalam <http://www.indianmirror.com/dynasty/dynasty-home.html> (Diakses tanggal 25 April 2013)

Salah satu keberhasilan dinasti Moghul adalah membawa Islam dalam puncak kejayaan. Akan tetapi kejayaan itu kemudian memudar, bahkan kedudukan kaum muslim India semakin terperuk karena kedatangan bangsa Inggris di India.

2.2 Sejarah India Modern

Kedatangan kulit putih di India di mulai tahun 1498 dengan kedatangan Vasco da Gamma di Calicut India yang kemudian di ikuti oleh kedatangan orang-orang kulit putih lain seperti bangsa Belanda, Inggris, Spanyol dan Perancis. Tujuan kedatangan bangsa kulit putih di India pada awalnya adalah untuk berdagang namun masing-masing juga meluaskan wilayah kekuasaannya. Belanda kemudian mengundurkan diri dari India karena kedudukannya di Indonesia menguat dan stabil. Sehingga kekuatan asing di India didominasi oleh Perancis di bawah Dupleix di wilayah Deccan dan Inggris dipimpin oleh Robert Clive yang beroperasi di wilayah Benggala.²¹

Kemunduran Perancis dari India disebabkan oleh kemenangan Inggris atas Perancis dalam perang Tujuh tahun (1756-1763). Dengan kemenangan tersebut, Inggris memperkuat daerah jajahannya dipimpin oleh Robert Clive, sejak saat itu

²¹*Op.Cit.*Tuti Nuriah.Hal50

mulailah kekuasaan tunggal Inggris di India karena Perancis menyerahkan semua daerah jajahan kepada Inggris dan sejak saat itu pula imperealisme Inggris di India berlangsung.

Posisi Inggris yang menguat di India berbanding terbalik dengan kondisi kerajaan-kerajaan di India yang kekuasaannya mulai melemah. melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaandi India dikarenakan politik adu domba yang dilakukan oleh Inggris serta perpecahan dikalangan kerajaan sendiri.

Inggris menjajah India kurang lebih 150 tahun, pada masa penjajahan tersebut rakyat India berada dalam kondisi yang tidak kondusif dimana pengangguran merajalela, orang Inggris hidup mewah di India sedangkan rakyat India hidup menderita. Selain itu diantara serdadu Inggris dan Indiapun terjadi perlakuan yang berbeda sehingga menimbulkan kebencian prajurit terhadap pemerintahan Inggris. Perasaan anti Inggris timbul dihati rakyat dan prajurit India, mereka merasa bernasib sama yakni disia-siakan Inggris, faktor tersebut akhirnya melahirkan pemberontakan *sepoy* (prajurit) pada tahun 1857 di Meerut dekat Delhi.²² Namun pemberontakan itu dengan mudah dapat ditumpas oleh Inggris, karena pemberontak jumlahnya hanya sedikit.

Keberadaan bangsa Inggris di India membuat masyarakat India sengsara, masyarakat India terancam dan tertindas di tanah air mereka sendiri. Keadaan tersebut membuat Allan Octavian Hume yang berkebangsaan Inggris asal Scotland prihatin dan pada tahun 1883 mengirim surat edaran kepada kaum terpelajar India untuk menyumbangkan tenaga guna kepentingan rakyat dengan usaha yang nyata melalui organisasi.²³ Ajakan tersebut mendapat tanggapan positif dan sambutan yang luas dari berbagai kalangan masyarakat India, sehingga pada tanggal 25-31 Desember 1885, diadakan suatu pertemuan di Bombay yang terdiri dari wakil-wakil rakyat India yang terdiri dari berbagai macam agama. Mereka kemudian membentuk suatu organisasi yang bernama “All Indian National Congress” atau yang disebut Kongres saja. Kongress tersebut dianggap sebagai manifestasi dari semangat kebangsaan India. Tujuan berdirinya Kongres

²²Ibid.Hal 53

²³ Ibid.Hal 54

adalah untuk memelihara dan mempertinggi kesejahteraan penduduk negara India dengan segala dan upaya yang sah.²⁴

Pada perkembangan selanjutnya, Kongres yang didominasi oleh kaum Hindu yang menyeleweng dari tujuan semula. Mereka lebih banyak memperjuangkan kepentingan kaum Hindu dari pada kaum minoritas lainnya. Dalam perkembangannya di dalam Kongres muncul slogan “India untuk Hindu”. Hal ini tentu saja menyinggung perasaan anggota yang tidak beragama Hindu. Mereka sangat tersinggung dan tidak bisa menerima slogan tersebut, karena itu berarti kaum Hindu menganggap bahwa selain penganut Hindu sama sekali tidak berhak untuk tinggal di India. Mereka yang non Hindu pada akhirnya mengundurkan diri dari keanggotaan Kongres.

Tahun 1906 merupakan tonggak bersejarah bagi kaum Muslim India. Pada tahun itu mereka mendirikan organisasi bagi kaum Muslim India yang bernama Liga Muslim. Organisasi ini dipimpin oleh seorang pengacara bernama Mohammad Ali Jinnah.²⁵ Tujuan dari organisasi ini adalah membela kepentingan kaum muslim di India dalam segala bidang, baik kehidupan ekonomi, politik, sosial serta kebudayaan yang bersumberkan Islam.²⁶ Dibawah kepemimpinan Mohammad Ali Jinnah mereka menyuarakan bahwa mereka (Kaum Muslim) tidak akan menjadi budak bagi kaum Hindu. Namun hal tersebut tidak menjadikan Liga Muslim sebagai organisasi yang fanatik, organisasi ini tetap mengembangkan toleransi beragama dan menganggap pemeluk agama lain berhak tinggal di India.

Liga Muslim banyak mendapat dukungan dari kaum Muslim India, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Liga Muslim dapat berkembang pesat dan menjadi partai yang kuat disamping Partai kongres (dulu adalah All National congress). Tuntutan Liga Muslim adalah adalah umat Islam di India memiliki kekuasaan sendiri untuk mereka diami dan mereka atur sebagaimana suatu negara. Mohammad Ali Jinnah menginginkan adanya negara Islam dan Hindu dalam satu federasi India. Liga Muslim dalam konfrensinya di Lahore tahun 1940, menuntut

²⁴ Suyani Indriastutri.2004. Rivalitas antara India Dan Pakistan dalam Konflik Kashmir di Bidang Militer. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember. Hal 20.

²⁵*Ibid.*Hal 21

²⁶*Op.Cit.*Tuti Nuriah.Hal 58

adanya suatu pemerintahan Muslim sendiri yang berdaulat. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Partai kongres.²⁷

Perjuangan menuju India merdeka dimulai dengan suatu kesadaran bahwa penjajah Inggris tidak akan memberikan kemerdekaan pada India. Ketika itu pihak India mengetahui isi Atlantik chapter yang salah satunya berisi bahwa bangsa-bangsa yang akan dimerdekakan adalah bangsa-bangsa yang masih dalam pengawasan sekutu.

Pada tanggal 14 Juli 1942, Partai Congress menuntut ditariknya pasukan Inggris dari India dan memberikan kemerdekaan pada India. Sebagai tindak lanjut dari tuntutan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1942 diresmikan suatu gerakan pemogokan, yaitu mereka tidak akan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris di India.²⁸

Gerakan tersebut semakin membuat Inggris merasa terpojok, sehingga pada bulan Februari 1947 keluarlah pengumuman dari Inggris yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan mengundurkan diri dari India paling lambat Juni 1948.²⁹

Menjelang kemerdekaan India, pemerintah Inggris memerintahkan Lord Mountbatten yang menjadi raja muda Inggris di India untuk mengambil tindakan. Lord Mountbatten mengusulkan tentang didirikannya dua dominion di wilayah India, yaitu India (sebagai wadah kaum Hindu) dan Pakistan (sebagai wadah kaum Islam). Setelah melalui perundingan yang cukup tegang antara Mountbatten, dengan tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru, Gandhi dan Ali Jinnah akhirnya dicapai persetujuan untuk mendirikan dua negara yang terpisah yaitu India dan Pakistan.³⁰ Baik Congress maupun Moeslem League menyetujui usul ini dan sebagai perwujudannya pada tanggal 14 Juli 1947 diajukan suatu Undang-undang Kemerdekaan India (*India Independent Bill*) kepada Badan Perwakilan Inggris

²⁷ Op. cit. suyani indriastuti. Hal 21

²⁸ *Ibid.* Hal 22.

²⁹ Lihat Tuti Nuriah, *op. cit.*, hal 70.

³⁰ *Ibid.* Hal 71.

yang berisi bahwa di India akan dibentuk dua dominion baru, yakni India dan Pakistan.³¹

Dua minggu kemudian Raja Inggris menandatangani Undang-undang tersebut yang mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1947 dengan demikian Inggris menyerahkan kekuasaan India kepada India dan Pakistan.³² Tanggal 15 Agustus selanjutnya mereka peringati sebagai hari kemerdekaan mereka. Akhirnya di wilayah India terbentuklah dua negara baru, yakni India yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru dan Pakistan yang dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah.

2.2 Terbentuknya Negara Pakistan

Kaum Hindu dan Muslim India telah hidup di atas tanah dan udara yang sama selama berabad-abad, serta sama-sama mengalami penjajahan Inggris selama kurang lebih 150 tahun, tetapi mereka tetap memperlihatkan perbedaan komunitas, menampakkan perbedaan dalam beribadat bahkan pula dalam prinsip-prinsip kebahasaan.³³ Segala perbedaan itu pada akhirnya menempatkan mereka pada sisi diamental, bahkan menyebabkan terjadinya fragmentasi dan permusuhan antara mereka.

Masyarakat India penganut Islam berusaha untuk mempertahankan dan membentuk identitasnya sendiri dihadapan kelompok mayoritas Hindu, sedangkan Hindu berupaya untuk tetap menegakkan ajaran agama dan budayanya . Perbedaan budaya dan persepsi ini kemudian menimbulkan adanya persaingan. Persaingan antar agama tersebut kerap kali memicu konflik, dimana kelompok minoritas seperti Islam merasa kepentingan politiknya selalu kalah dengan kepentingan kelompok mayoritas yakni Hindu. Sedangkan kelompok mayoritas Hindu mulai terancam dengan Islam, perasaan was-was yang dialami oleh kaum Hindu dilatar belakangi oleh banyaknya umat Hindu kasta bawah memilih berpindah agama ke Islam demi menghapuskan sistem kasta yang melekat pada diri mereka.

³¹ Op. cit. suyani indriastuti. Hal 22

³² Lihat Tuti Nuriah, *op. cit.*, hal 71.

³³ Dhurorudin Mashad. 2004. Kashmir Derita Yang Tak Kunjung USai. Khalifa. Jakarta Utara. Hal ix

Kedatangan bangsa Inggris di India mendapat tempat yang istimewa dan memiliki kekuasaan yang luas. Pada saat itu otoritas kaum muslim terbatas, mereka hanya memiliki kekuasaan di New Delhi sebagai sisa-sisa kekhalifahan Moghul. Kondisi ini semakin parah ketika timbul pemberontakan terhadap India terhadap penjajah Inggris tahun 1857 sampai 1858 yang dimotori oleh kaum muslim India. Penjajah Inggris dapat dengan mudah menumpas pemberontakan tersebut karena jumlah kaum pemberontak hanya sedikit.

Kekalahan kaum muslim dalam pemberontakan tersebut semakin memperburuk posisi kaum muslim di India dan menggeser kaum Muslim India dan menjadikan mereka menjadi kelompok lapis bawah yang dimusuhi dan dicurigai oleh Inggris. Otoritas kaum Muslim yang semula terbatas di New Delhi menjadi hilang.

Keberadaan bangsa Inggris di India membuat masyarakat India sengsara, masyarakat India terancam dan tertindas di tanah air mereka sendiri. Keadaan tersebut membuat Allan Octavian Hume yang berkebangsaan Inggris asal Scotland prihatin dan pada tahun 1883 mengirim surat edaran kepada kaum terpelajar India untuk menyumbangkan tenaga guna kepentingan rakyat dengan usaha yang nyata melalui organisasi.³⁴ Ajakan tersebut mendapat tanggapan positif dan sambutan yang luas dari berbagai kalangan masyarakat India, sehingga pada tanggal 25-31 Desember 1885, diadakan suatu pertemuan di Bombay yang terdiri dari wakil-wakil rakyat India yang terdiri dari berbagai macam agama.³⁵ Mereka kemudian membentuk suatu organisasi yang bernama “All Indian National Congress” atau yang disebut Kongres saja. Kongres tersebut dianggap sebagai manifestasi dari semangat kebangsaan India.

Tetapi sayang rasa kebersamaan bangsa India yang tercermin dalam All Indian Congress tersebut sedikit goyah. Keharmonisan hubungan diantara berbagai golongan sempat memudar khususnya antara golongan Islam dan golongan Hindu. Gejala-gejala perpecahan telah terjadi di kalangan Kongres maupun diluarnya, yang dicetuskan oleh B.G Tilak dan Sayid Ahmad Khan. Tokoh

³⁴ Lihat Tuti Nuriah, *op. cit.*, hal 53

³⁵ *Op. cit.* suyani indriastuti. Hal 20

terkenal B.G Tilak adalah adalah seorang Maratha yang berasal dari Decan berusaha keras untuk menghidupkan kembali politik militan dan adat istiadat yang bersumber dari religi Hindu. Dan Tilak adalah seorang yang anti Islam dan anti Barat. Penyebar luasan cita-citanya yang sangat menekan kaum muslimim mengurangi selera mereka untuk turut aktif di dalam Kongres. Sedangkan Sayid Ahmad Khan adalah seorang penentang Kongres tidak pernah memperhatikan golongan kecil. Selanjutnya di pihak Hindu semakin keras semboyan “India untuk Hindu”.³⁶ Semboyan tersebut mengakibatkan pertentangan yang terjadi di antara golongan Islam-Hindu di tubuh Kongres semakin meruncing.

Diluar Kongres, pada tahun 1906 dibentuk sebuah organisasi bernama Liga Muslim yang didirikan oleh golongan Islam yang bertujuan membela kepentingan kaum muslimin disegala lapangan kehidupan ekonomi, politik, sosial serta kebudayaan yang bersumberkan Islam.³⁷ Organisasi ini dipimpin oleh seorang pengacara yang bernama Ali Jinnah. Dibawah pimpinan Ali Jinnah mereka meyarakan bahwa mereka (kaum Muslim) tidak akan menjadi budak kaum Hindu. Akan tetapi disamping hal tersebut, Mohammad Ali Jinnah telah membawa organisasi Liga Muslim menjadi organisasi yang tidak fanatik, mereka tetap mengembangkan toleransi beragama.

Dalam waktu yang relatif singkat, Liga Muslim berkembang pesat dan menjadi partai yang kuat disamping Partai Kongres. Tuntutan Liga Muslim adalah umat Islam di India memiliki wilayah kekuasaan sendiri untuk mereka diami dan mereka atur sendiri sebagai suatu negara. Muhammad Ali Jinnah menginginkan adanya negara Islam dan negara Hindu dalam suatu federasi India.³⁸

Berita menggembirakan datang dari Pemerintah kolonial Inggris yang akan mengadakan pembaharuan undang-undang dan akan menentukan status India. Hal tersebut memberikan harapan bagi bangsa India untuk menentukan nasibnya sendiri melalui cara-cara yang legal yang didasarkan pada undang-

³⁶ Lihat Tuti Nuriah, *op. cit.*, hal 54

³⁷ *Ibid.* Hal 58

³⁸ Sofyan Naim, Hubungan India-Pakistan Pada Era Ketegangan Negara Adi Kuasa, IKIP Padang, Padang, 1990, Hal 20

undang. Perubahan kebijakan pemerintah Inggris terjadi sejak Lord Curzon digantikan oleh Lord Minto.

Golongan Islam sebagai kelompok minoritas di India meminta pada pemerintahan Inggris yang baru agar golongan minoritas mempunyai wakil-wakil di dalam pemerintahan melalui cara pemilihan yang terpisah. Mereka menginginkan hal tersebut ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan India yang baru. Pada tahun 1909 disahkanlah undang-undang yang baru yang dikenal dengan sebutan Indian Councils Act 1909.³⁹

Tuntutan golongan Islam telah diterima oleh Lord Minto dan direalisasikan dalam Indian Councils Act. Dengan disahkannya undang-undang baru tersebut berarti ada jaminan bahwa kepentingan-kepentingan kelompok minoritas dapat diperjuangkan melalui perwakilannya di parlemen. Namun hal ini mendapat pertentangan dari golongan Hindu.⁴⁰

Pertentangan antara golongan Islam-Hindu terkait masalah tuntutan kelompok Islam yang meminta perwakilan di parlemen berlangsung dari tahun 1911 sampai 1916. Pertentangan tersebut diselingi dengan tuntutan untuk dibentuknya pemerintahan sendiri bagi India akan tetapi tetap berada di lingkungan Inggris raya yaitu tuntutan *Home Rule*.⁴¹

Pergolakan di India yang bersifat non kooperatif sudah dimulai sejak tahun 1915. Pemerintah Inggris menekan gerakan kebangsaan dengan menggunakan kekerasan berdasarkan pada undang-undang pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah, yang terkenal dengan istilah Defence of India Act tahun 1915. Salah satu kejadian penting yang berhubungan dengan pertentangan sikap kompromis antara golongan Islam-Hindu adalah ditandatanganinya Perjanjian Lucknow antara kedua golongan tersebut yang masing-masing dicerminkan atau diwakili oleh kongres dan Liga Muslim.⁴²

Dari perjanjian Lucknow tersebut dapat dikatakan bahwa masalah yang berkenaan dengan perselisihan karena tuntutan minoritas Islam telah terselesaikan.

³⁹ Lihat Tuti Nuriah, *op. cit.*, hal 59

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Perjanjian tersebut memberikan jaminan pada golongan Islam untuk duduk dalam pemerintahan dan turut serta membangun pemerintahan.

Pada tahun 1919, Inggris menepati janjinya untuk menjadikan India sebagai negara bagian dari kerajaan Inggris. Hal tersebut dirumuskan dalam undang-undang yang disebut Indian Act 1919.⁴³ Dengan diberlakukannya undang-undang baru tersebut dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pemilihan umum. Untuk keperluan pemilihan umum tersebut, golongan Islam dan Hindu mendirikan partai-partai politik dan menyusun program. Partai-partai dari golongan Hindu antara lain: Partai nasional liberal Federation, Partai Swaraj, dan Partai Hindu Mahasabha yang didirikan khusus untuk mempertahankan adat istiadat yang besumber pada religi Hindu. Partai tersebut seluruhnya berfaliasi kepada Kongres. Sedangkan partai-partai golongan Islam antara lain: Central Moeslem Party, Imdependent Party dan Partai Nasionalis yang keseluruhannya berfasiliasi pada Liga Muslim.⁴⁴

Perkembangan keadaan yang berhubungan dengan cita-cita politik telah tumbuh di seluruh lapisan masyarakat yaitu kemerdekaan penuh bagi India. Pada tahun 1924 diusulkan perwakilan dari berbagai golongan untuk mengubah Undang-undang Pemerintahan India (India Act 1919) dan menuntut agar segera diberikan kemerdekaan bagi India dengan status dominion.⁴⁵ Pada tahun 1929 Pemerintahan Inggris mengumumkan bahwa India Act tahun 1919 akan dirubah tetapi usul kemerdekaan India tidak mendapat jawaban hyang memuaskan.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah Inggris untuk mengadakan perubahan Undang-undang maka pemimpin pergerakan mengambil inisiatif untuk ikut merumuskan perubahan Undang-undang dasar bagi India merdeka, maka dibentuklah All India Conference, berdasarkan persetujuan partai-partai maka konfrensi tersebut membentuk panitia kecil yang bertugas merancang susunan pemerintahan dan UUD. Pamitia itu diketuai Pandit Montilal Nehru (Panitia Nehru).⁴⁶

⁴³*Ibid.* Hal 60

⁴⁴*Ibid.* Hal 61

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*Hal 61

Hasil kerja Panitia Nehru yaitu rancangan konstitusi ditentang oleh golongan Islam karena mengingkari isi perjanjian Lucknow dan sejak itu pertentangan antara golongan Islam dan Hindu muncul kembali. Rancangan konstitusi tersebut menyatakan bahwa “India yang merdeka bersifat persatuan dengan sistem Parlemen akan terdiri dari Senat yang dipilih oleh dewan-dewan Provinsi, dan Dewan perwakilan Rakyat dipilih berdasarkan pemilihan umum”.⁴⁷ Pemilihan menurut perbedaan agama dan golongan dihapuskan. Rancangan konstitusi yang dirumuskan oleh Panitia Nehru tidak menerima tuntutan kaum muslimin yang telah disetujui dalam perjanjian terdahulu yaitu Lucknow.

Perang dunia pecah pada bulan september 1939 di Eropa dan dengan cepat meluas ke Afrika dan Asia. Inggris yang turut dalam perang tersebut berharap mendapat dukungan dan bantuan dari India. Namun masyarakat India ingin melepaskan diri dari politik imperialisme dan Fasisme serta menjalankan politik sendiri dalam mencapai kemerdekaan dan perdamaian. Karena tuntutan Kongres tentang kemerdekaan penuh atas India semakin tajam, Nehru ditangkap dan dipenjara karena dianggap telah menghasut rakyat. Sementara itu Gandhi menentang karena ada militerisasi dikalangan orang-orang India.

Churchill yang cemas mengenai pertahanan India mengutus Sir Stafford Cripps untuk mengunjungi India dan menjajaki keinginan masing-masing golongan di India. Pemerintah Inggris kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Inggris memberikan status dominion dibawah perserikatan Inggris Raya, sedangkan Gandhi mengusulkan “Quit India”.⁴⁸ Sedangkan Liga muslim dibawah pimpinan Ali Jinnah menuntut kepada Inggris untuk membentuk dua negara yang terpisah yaitu India untuk orang Hindu dan negara baru (yang kelak dikenal Pakistan) untuk umat Islam.

Pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kabinet Churchill di Inggris jatuh dan diganti kabinet Atlee dari partai buruh. Atlee mengirim utusannya ke India yang terdiri dari Lord Pethric Laurence, Sir Staford Cripps

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *ibid.* Hal 69

dan A. V. Alexander pada akhir bulan maret 1946.⁴⁹ Di India mereka mengadakan perundingan dengan tokoh Kongres dan Liga Muslim di Simla. Perundingan ini tidak membuahkan hasil karena Kongres menolak usulan Liga muslim menuntut dibentuknya negara baru bagi umat Islam. Ali Jinnah menuduh Nehru melanggar peratutran yang telah disepakati bersama.

Jawaharlal Nehru kemudian membentuk Kabinet tanpa Liga Muslim, Ia mengambil golongan Islam yang ada di Kongres. Tindakan Nehru tersebut mendapat protes keras dari Ali Jinnah dan sebagai akibatnya pertentangan antara golongan Hindu dan golongan Islam semakin tajam.⁵⁰

Pada bulan Februari 1947 keluarlah pengumuman dari Inggris yang menyatakan bahwa Pemerintah Inggris akan mengundurkan diri dari India paling lambat Juni 1948.⁵¹ Menjelang kemerdekaan raja muda Inggris yakni Lord Mounbatten mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi dan Ali Jinnah perundingan tersebut memuat masa depan India selepas kepergian Inggris. Dari perundingan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan dua negara yang terpisah yaitu India dan Pakistan. Baik Kongres maupun Liga Muslim menyetujui usulan ini dan sebagai perwujudannya pada tanggal 14 Juli 1947, Atlee mengajukan Undang-undang Kemerdekaan India kepada Badan Perwakilan Inggris. Dua minggu kemudian Raja Inggris menandatangani Undang-undang tersebut yang akan mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1947.⁵²

Pada tanggal 15 Agustus Inggris menyerahkan kekuasaan kepada rakyat India, penyerahan kekuasaan tersebut menandai berakhirnya riwayat Inggris di India sekaligus menandai lahirnya dua negara merdeka yakni India dan Pakistan.

Gambar 2.5 Peta India sebelum dan sesudah Partisi

⁴⁹ Ibid. Hal 70

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid. Hal 71



2.3 Bergabungnya Kashmir dalam India

Problema Kashmir bermula ketika masyarakat Muslim di anak benua India membangun negara sendiri yakni Pakistan dan lepas dari India yang didominasi Hindu. Berbagai wilayah yang didominasi Muslim menggabungkan diri dengan Pakistan, sedangkan daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim masuk ke India. Namun persoalan muncul terkait wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim dan Raja beragama Hindu. Sebelum bercerita lebih banyak terkait status Kashmir, ada baiknya mengetahui gambaran umum Kashmir.

2.3.1 Gambaran Umum Kashmir

Kashmir adalah suatu daerah yang subur dan indah, yang terletak di lembah pegunungan Himalaya. Kashmir yang terletak di bagian barat laut India memiliki luas yang kurang lebih 222,36 Km². Daerah Kashmir merupakan daerah yang bergunung-gunung dan letaknya sangat strategis. Bagian barat laut berbatasan dengan Afghanistan, timur laut berbatasan dengan China, bagian selatan berbatasan dengan negara bagian India yaitu Himachal Pradesh dan Punjab (Punjab Timur), sedangkan bagian barat berbatasan dengan tapal utara dan barat Punjab yang masuk dalam wilayah Pakistan (Punjab Barat).⁵³

⁵³Jammu & Kashmir, Microsoft (R) Encarta (R), 1996, encyclopedia 1993-1995

Wilayah kashmir terdiri dari 3 propinsi, yaitu propinsi Ladakh, Propinsi Kashmir dan Propinsi Jammu. Kashmir merupakan daerah yang subur dan ditunjang dengan adanya sungai-sungai yaitu sungai Sutelj, sungai Ravi, sungai Indus, sungai Jhelum, sungai Chenab serta mata air yang sangat dibutuhkan India dan Pakistan. Sungai Sutelj dan Sungai Ravi sebenarnya berhulu di daerah India daerah aliran sugainya melewati kashmir yang kemudian terus ke Pakistan. Sungai-sungai ini memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian masyarakat India maupun masyarakat Pakistan karena mata pencaharian mayoritas kedua negara ini adalah pertanian.⁵⁴

Kehidupan beragama penduduk Kashmir tidak homogen, akan tetapi mayoritas penduduk Kashmir beragama Islam. Penduduk muslim Kashmir berjumlah kurang lebih 78%, mereka bermukim di daerah bagian selatan Kashmir sampai bagian barat Jammu. Dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Urdu dan Kashmiri. Sedangkan pemeluk agama Hindu dan Sikh tinggal di bagian Timur Kashmir dan menggunakan bahasa Hindi, Dogri, dan Punjabi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagian utara dan barat Ladakh, penduduknya beragama Budha dan dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Balthi dan Ladakh.

Dalam kehidupan perekonomian atau mata pencaharain, Penduduk Kashmir memanfaatkan tanahnya yang subur untuk bercocok tanam, sehingga banyak warga Kashmir yang bekeja sebagai Petani dan mengandalkan hasil bumi mereka untuk hidup. Selain itu, mereka juga berternak kerbau, domba, kambing, lembu dan unggas. Di Kashmir juga terdapat industri besar, yakni Industri tenun sutera dan karpet, banyak masyarakat kashmir yang bekerja sebagai buruh dari pabrik tersebut.

2.3.2 Latar Belakag timbulnya Konflik antara India dan Pakistan

Pemisahan antara India dan Pakistan telah membawa dampak besar bagi stabilitas keamanan wilayah keduanya. Lahirnya dua negara merdeka yang berasal

⁵⁴ Sofyan Naim, Hubungan India-Pakistan Pada Era Meredanya Ketegangan Adi Kuasa, IKIP Padang, 1990, Hal 49

dari satu kesatuan tidak menjamin kehidupan bertetangga keduanya berjalan dengan aman dan tenang. Malah sebaliknya, keduanya terlibat dalam pertikaian panjang yang muncul sejak keduanya merdeka hingga sekarang. Masalah pertama terkait dengan pembagian wilayah dan pemindahan penduduk yang akan menjadi penduduk negara India atau menjadi penduduk Pakistan, tidak semua penduduk berkehendak pindah dari tempat tinggalnya semula. Menindak lanjuti pemisahan tersebut, pemerintah Inggris memberi kebebasan kepada kerajaan-kerajaan yang dulu menjadi bagian dari India pada masa penjajahannya untuk menentukan nasibnya sendiri. Apakah memilih bergabung dengan India atau memilih bergabung dengan Pakistan.

Dalam proses penggabungan wilayah cultural kepada wilayah nasional baru (India dan Pakistan) dari 562 wilayah (ada yang menyebut 565 bahkan 585), terdapat tiga wilayah yang berpersoalan, yaitu: Junagadh, Hyderabad, dan Jammu Kashmir.⁵⁵ Junagadh merupakan wilayah yang mayoritas Hindu dengan pemimpin Islam dan cenderung pro Pakistan. Hyderabad berpenduduk mayoritas Hindu dengan penguasa Islam dan tidak berkecendrungan memilih India atau Pakistan. Sedangkan Jammu Kashmir penduduknya mayoritas muslim dan pro Pakistan dengan pemimpin seorang Hindu menginginkan membentuk negara sendiri atau memilih bergabung dengan India.

Junagath dan Hyderabad melalui diplomasi maupun tindakan militer dari India, akhirnya dua kerajaan tersebut masuk dalam negara India. Sementara itu Kashmir masih belum menentukan status akan ikut India atau Pakistan, besar keinginan masyarakat Kashmir untuk membentuk negara sendiri atau bergabung dengan Pakistan.

Pakistan merasa Kashmir semestinya masuk kedalam wilayah teritorialnya karena mayoritas rakyatnya beraga Islam dan wilayah Kashmir lebih dekat dengan Pakistan dibandingkan dengan India. Seperti Hyderabad dan Junagadh pertimbangan mayoritas penduduknya beragama Hindu mengakibatkan Pakistan tidak terlalu mempermasalahkan ketika bergabung dengan India. Disisi lain oleh India, Kashmir diharapkan bergabung dengan India untuk membuktikan bahwa

⁵⁵ Lihat Dhurorudin Mashad. *op.cit.* Hal 35

mayoritas muslim di sebuah negara bagian bukanlah suatu ancaman dalam konteks India yang sekuler. Sementara disisi lain, Maharaja Hari Singh berusaha agar kerajaan yang dipimpinnya dapat merdeka, dengan memperlambat keputusannya untuk memilih India atau Pakistan sampai terjadi Partisi.

Pada bulan Oktober 1947 terjadi pemberontakan oleh suku Pashtun yang tinggal di sebelah barat wilayah Kashmir terhadap Maharaja Hari Singh. Pemberontakan ini menentang kekuasaan Maharaja Hari Singh yang selama ini mendapat dukungan Inggris untuk menekan mereka. Kesempatan ini digunakan Pakistan untuk menduduki wilayah Kashmir dengan mengirim pasukan untuk mendukung pemberontakan tersebut. Pasukan Pakistan masuk ke wilayah Kashmir yang saat itu belum bersikap untuk bergabung dengan India atau Pakistan.⁵⁶

Maharaja Hari Singh lalu meminta bantuan militer kepada pemerintah India. Perdana menteri Pandit Jawaharlal Nehru berjanji akan membantu Hari Singh jika Ia menerima dua syarat dari India. Pertama, Maharaja harus menyetujui Kashmir bergabung dengan India. Kedua harus mendapat restu dari pimpinan Jammu-Kashmir yang sekular dan pro untuk bergabung dengan India. Hari Singh akhirnya menyetujui syarat yang diajukan oleh Pemerintah India dan memutuskan Kashmir untuk bergabung dengan India dengan ditandatanganinya berkas penggabungan diri Kashmir kepada India (*Instrument of Accession to Indian Union*) pada tanggal 26 Oktober 1947.⁵⁷

India dan Pakistan mengklaim Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya dengan alasan masing-masing. Dhurorudin Mashad dalam bukunya yang berjudul *Kashmir Derita yang Tak kunjung Usai* mengemukakan beberapa alasan menunjukkan pentingnya Kashmir bagi Pakistan, yaitu:

1. Sewaktu berdirinya negara Pakistan, alasannya adalah untuk membentuk negara Muslim Asia Selatan. Sebab itu argumentasi bahwa Kashmir yang mayoritas penduduknya Islam seharusnya bergabung dengan Pakistan. Pada tahun 1950, dari 4.370.000 penduduk Jammu-Kashmir, 3.101.247

⁵⁶Chairul aftah. 2005. Studi tentang Posisi Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan. Jurnal Sosial Budaya dan Politik, 11 (6): Universitas Mulawarman: Hal 16.

⁵⁷*Ibid.*

jiwa atau 77,1 persen adalah muslim, sedangkan Hindu hanya sekitar 20,1 persen, dan yang beragama Sikh 1,64 persen. Fakta ini menjadi alasan kuat bagi Pakistan untuk mengklaim wilayah Kashmir sesuai logika berdirinya negara Pakistan.

2. Secara geografis Kashmir lebih terikat kepada Pakistan sebab untuk mencapai Kashmir lebih terbuka dari Pakistan. Sampai saat ini jalan termudah untuk mencapai Kashmir adalah dengan melalui bagian barat punjab lewat Sialkot dan Rawalpindi (Pakistan). Paska perang tahun 1947 India memang membangun jalan melalui Pathanakot tetapi sangat buruk karena kondisinya sangat terjal. Oleh karena itu secara ekonomi Kashmir lebih dekat terikat dengan Pakistan dari pada India.
3. Air sungai Indus, chenab dan Jhelum semuanya mengalir melalui Kashmir yang penting artinya bagi pertanian Pakistan. Oleh sebab itu kalau tidak menguagai Kashmir maka sangat berbahaya bagi pertaniannya yang tergantung pada tiga sungai tersebut.
4. Keindahan dan kemakmuran Kashmir terkenal di seluruh dunia yang akan berarti untuk perekonomian Pakistan.
5. Wilayah Kashmir memiliki posisi strategis yang penting. Wilayah ini terletak di dataran tinggi yang bergunung, dari san posisi kedua negara mudah untuk dipantau.

Sementara arti penting Kashmir bagi India adalah:

1. Alasan strategis, wilayah Kashmir yang bergunung-gunungsanagt bagus untuk wilayah pertahanan. Apalagi wilayah ini berbatasan langsung dengan Tibet, cina, afganistan dan Uni Sovie. Sehingga Kashmir menjadi pintu depam terhadap dunia luar.
2. Secara ekonomi Kashmir merupakan wilayah yang potensial, mengingta daerah ini terkenal subur sebagai lumbung padi dan sayur-sayuran. Selain itu memiliki panorama yang sangat indah sehingga sangat berharga utuk dijadikan daerah wisata.

Bagi India, masalah Kashmir adalah masalah harga diri dan kedaulatan. Jika Kashmir lepas maka ditakutkan tuntutan serupa dari kaum Sikh di Punjab atau mungkin akan muncul tuntutan dari kelompok-kelompok yang lain. Bagi Pakistan, ancaman teror India terhadap penduduk Kashmir mengakibatkan beban ekonomi meningkat, karena banyak pengungsi Kashmir yang masuk ke wilayah Pakistan baik secara resmi maupun ilegal. Sehingga tak heran jika Pakistan memperjuangkan kemerdekaan Kashmir dari India dan menginginkan Kashmir untuk bergabung dengan Pakistan. .



BAB 3. KONDISI MASYARAKAT KASHMIR DI BAWAH PEMERINTAH INDIA

3.1 Tindak Represif Pemerintah India Terhadap Masyarakat Kashmir

Klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah India atas Kashmir menyebabkan ketiadaan faktor perekat antara rakyat Kashmir dengan pemerintah India. Ketiadaan faktor perekat mengakibatkan New Delhi menerapkan kebijakan penuh curiga. Dalam konteks seperti ini badan intelejen dan kekuatan militer menjadi sarana paling dominan dalam menjalankan fungsi kekuasaan dan atau pemerintahan. Pemerintah model represif ini bahkan menguat eskalasinya, terutama setelah meletus pemberontakan bersenjata yang dilancarkan kaum Kashmir pada 1989. Sejak itulah pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan menjadi elemen kekuasaan yang paling penting dan dominan dalam pemerintahan India dalam mengelola Kashmir. Pendekatan militer menjadi cara paling dominan yang dijalankan melalui berbagai operasi *Border Security Force* (BSF).

Sejak Januari 1990 India mulai memperkuat pendekatan keamanan di Kashmir dengan menempatkan tentara India dalam jumlah besar di wilayah Kashmir. Tentara India melakukan terror terhadap rakyat Kashmir terutama mereka yang dicurigai berkomplot dengan kelompok militan.

Pada Januari 1990 pemerintah India menempatkan 600 ribu tentaranya di Kashmir untuk menghadapi 10-30 ribu pejuang Kashmir. Berarti setiap 1-3 Pejuang Kashmir harus berhadapan dengan 60 tentara India. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sekitar 2.800.000 berarti 1 tentara mengawasi 4-5 orang penduduk.⁵⁸

Tentara India melakukan terror terhadap rakyat, terutama mereka yang dicurigai berkomplot dengan kaum militan. Bahkan tentara India melakukan

⁵⁸Dhurorudin Mashad. 2004. Kashmir Derita Yang Tak Kunjung Usai. Khalifa. Jakarta Utara. Hal127.

eksekusi terhadap masyarakat yang dicurigai melindungi pejuang Kashmir, sedangkan keluarga mereka ditahan dan untuk perempuan diperkosa.

Menurut hasil penelain *Asian Watch* dan *Physicians for Human Right* (PHR) selama satu minggu saja (1992) berhasil didokumentasikan 15 Kasus perkosaan, 44 pelaksanaan eksekusi, 8 penganiayaan, 20 orang luka akibat tembakan personel India. Bahkan berdasarkan Press release dari *Amnesty International* (10 April 1991) pasukan keamanan pada 23-24 Februari 1991 telah beberapa memerkosa wanita takkala melakukan penggerebekan di perkampungan Kunan Poshpora di distrik Kupwara, Kashmir. Akibat terror ini rata-rata setiap minggu antara tiga sampai empat family warga Kahmir ingin menyebrang perbatasan.⁵⁹

Pada 23 Februari 1991 terjadi pembantaian di daerah pegunungan Kunan Poshpora. Lebih dari 800 tentara dari Resimen Rajput IV mengepung kampung, memaksa kaum pria keluar rumah, lalu digledah mencari senjata. Sejumlah wanita diperkosa, bahkan menurut catatan *Federation Internationale des Ligue des Drpits de l'Homme* (FIDH)terdapat 23-60 wanita menjadi korban dalam penyerangan malam itu.⁶⁰

Sebenarnya pada keseharian pun serdadu India sudah biasa menciduk gadis untuk dibawa ke markas yang lantas menerima perlakuan tak senonoh dari petugas. Bahkan banyak wanita muda yang hamil, dan sebagian bunuh diri akibat malu. Perkosaan itu dilakukan oleh petugas dengan tujuan mendapatkan informasi lebih banyak tentang gerakan perlawanan. Kasus pemerkosaan biasanya terjadi dalam dua situasi: (1). Ketika aparat melakukan operasi ke sebuah wilayah, (2).Ketika wanita diambil ke markas untuk di introgasi atas tuduhan membantu militan.

Berdasarkan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia di Srinagar yang diberi judul *Kahmir Bleeds* (1991) disebutkan bahwa aksi-aksi kekerasan yang

⁵⁹Ibid hal 128.

⁶⁰Ibid hal 130.

dilakukan aparat India menyebabkan 2.300 orang meninggal di tempat pengintrogasian, dan 40-50 orang terbunuh setiap harinya. Menurut hasil penyelidikan yang dikumpulkan FIDH, peristiwa penganiayaan memang sering dilakukan petugas keamanan dipusat pusta interogasi, terutama terhadap penduduk yang dicurigai punya hubungan erat dengan kalangan militan. Juga menurut laporan *Jammu and Kashmir Council for Humam Right* (JKCHR) yang berkedudukan di London, dan memiliki sejumlah cabang di Pakistan dan Azad Kashmir misalnya, antara Oktober 1991 sampai April 1993 hampir 12 Ribu orang terbunuh dan 285 diantaranya akibat penganiayaan. Laporan yang diberi judul *Torture, Rape and Death* ini juga menyebutkan bahwa pada periode yang sama terdapat 10-15 Ribu pengungsi Kashmir yang terdaftar di Pakistan, yang jumlah rillnya bahkan diperirakan bisa mencapai 20 ribu jiwa.⁶¹

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara India sangat diduga sebagai bagian dari kebijakan resmi atau tindakan yang direstui oleh pemerintah New Delhi. Terbukti penyelidikan terhadap kasus itu nyaris taka da yang berhasil, terhambat oleh sistem dan prosedur yang rumit. Kalaupun terdapat bukti yang kuat pelaku pemerkosaan adalah aparat, tetapi penyelidik sulit menerapkan hukuman sebab aparat berdalih bahwa korban memang terlibat dalam gerakan militan atau setidaknya sebagai simpatisan, sehingga patut mendapatkan hukuman.

Tindak kekerasan pemerintah India terhadap masyarakat Kashmir telah berlangsung lama, bahkan sejak awal kemerdekaan 1947. Antara 1989-2000 saja lebih dari 70.000 Muslim Kashmir menjadi korban, Informasi lebih lanjut tentang kekerasan aparat India terhadap masyarakat Kashmir simak tabel 3.1.⁶²

Jenis Pelanggaran	Jumlah jiwa (orang)
A. Di dalam wilayah Jammu dan Kashmir	
1. Dibunuh	71.204
2. Terluka	29.561

⁶¹Ibid hal 131.

⁶²Ibid hal 145.

3. Anak sekolah dibakar hidup hidup	553
4. Kelompok lain dibakar hidup hidup	674
5. Mayat ditemukan dari sungai Jhelum	617
6. Pemerkosaan (umur 7-70 tahun)	7.613
7. Penganiayaan sampai impoten	6.726
8. Penganiayaan alat seksual perempuan	16.607
9. Penangkapan secara illegal	92.054
10. Cacat seumur hidup	41.760
11. Diusir dari rumah	50.491
12. Perusakan RS dan sekolah	607
13. Perusakan dan pembakaran rumah	21.365
14. Perusakan dan pembakaran toko	10.171
15. Penghancuran gudang makanan dan pertanian	seharga 843 juta Rs
B. Disepanjang Line of Control	
1. Dibunuh	1.539
2. Terluka	21.439
3. Perusakan kekayaan/hak milik	Seharga 42 Milyar Rs

Dalam *Universal Declaration on Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia) pasal 9 menyatakan “*Any individual (Citizen) can neither be detained, nor arrested/authoritarianism by the head of the state*: Setiap individu (warga negara) tidak dapat ditangkap, ditahan, atau diusir hanya berdasarkan keinginan personal, pemyalahgunaan kekuasaan/toritarianisme kepala negara_”, sementara itu pasal sebelas menyatakan:⁶³

A. Any individual (citizen) accused of military act is innocent, until proven guilty. He (the defendant) has full right to legal help/ appeal to the judiciary or take his case before a court/ bench to prove himself innocent: setiap individu yang dituduh berdasarkan military act pada dasarnya tak bersalah, sampai dibuktikan bahwa dia memang bersalah. Si

⁶³ *ibid* hal 144

tertuduh mempunyai hak penuh untuk memperoleh bantuan hukum di pengadilan atau sebelum kasus dibawa ke pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

B. *Any person on basis of mere suspicion at the time of certain given criminal act, or after, cannot be charged or penalized in writing under the national and international laws:* Setiap orang yang baru dicurigai pada saat sebelum criminal act tertentu diberlakukan, atau sesudahnya, tak dapat didakwa dan diadili berdasarkan hukum nasional maupun internasional.⁶⁴

India bukan hanya melanggar artikel 9 dan 11 dari *Universal Declaration of Human Right* saja, melainkan pula melanggar banyak hal penting dari resolusi PBB tahun 1948 dan 1949 dalam soal Kashmir. Perlu dicatat resolusi itu mempunyai point point dasar, antara lain adalah: (1). Adanya complain keberatan DK PBB terhadap pengklaiman wilayah Kashmir oleh India, (2). Berarti Dewan secara eksplisit menolak Kashmir sebagai wilayah India secara legal, (3). Resolusi PBB menetapkan *self-determination* (plebisit) sebagai prinsip untuk menyelesaikan sengketa Kashmir. Hal ini merupakan komitmen internasional terhadap Kashmir. (4). Mendorong kesepakatan India dan Pakistan melalui UNCIP untuk melakukan plebisit.

India juga melanggar kesepakatan Simla (Sima Agreement) 2 Juli 1972 yang dimaknakan bahwa persoalan Kashmir sudah selesai, oleh karena itu tidak perlu dibicarakan kembali. Padahal kesepakatan itu sama sekali tak mengubah status Jammu Kashmir sebagai daerah sengketa dan tak mencabut isu Kashmir dari agenda PBB. Klausul 1 dalam kesepakatan itu disebutkan: (i). Resolusi PBB (UN Charter) hendaknya dijadikan landasan untuk mengatasi hubungan India dan Pakistan, (ii). Penyelesaian perbedaan hendaknya diselesaikan dengan cara-cara damai, (iv). Mengatasi isu-isu mendasar dan penyebab konflik antara dua negara selama puluhan tahun. Klausul 4 dari point (ii) juga menyatakan : membicarakan

⁶⁴ *Ibid* hal 145.

line of control sebagai sesuatu yang perlu dibedakan dari persoalan international border (batas internasional). Sedangkan klausul 6 menyebutkan bahwa penyelesaian akhir Jammu Kashmir merupakan suatu persoalan terpenting dari penyelesaian yang ditunggu tunggu.

Tingkat pelanggaran HAM kian meningkat kualitas maupun kuantitasnya, terutama setelah meningkatnya kerjasama India dengan Israel. Israel dengan tim intelejen militernya membantu New Delhi untuk menumpas gerakan kemerdekaan Jammu Kashmir. Dengan masifnya hubungan kedua negara dan pelanggaran HAM itu, kiranya dapat di proyeksikan bahwa upaya refresif pemerintah India terhadap pejuang Kashmir akan meluas arenanya dan makin canggung rekayasanya. Fenomena ini menjadi ancaman yang serius bagi eksistensi perjuangan rakyat Kashmir.

3.2. Perekonomian Kashmir Di Bawah Pemerintah India

Satu hal yang menarik dari kasus Kashmir adalah apabila perkembangan politik kontemporer sangat mewarnai bangkitnya nasionalisme etnik Kashmir, tidak demikian halnya dengan faktor ekonomi. Sebabnya adalah indikator-indikator diskriminasi ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, ketidakseimbangan pemilikan lahan dan property, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dan keahlian, ketidakleluasaan dalam melakukan kegiatan komersil, dan tertutupnya akses kepada pekerjaan dan profesi tertentu, kelompok-kelompok etnik memisahkan diri dari suatu Negara, tidak terlihat menyolok dalam kasus Kashmir.

Secara ekonomi wilayah Kashmir bisa dibilang tertinggal dari wilayah wilayah bagian negara lain di India, meskipun bukan menjadi negara bagian yang paling terbelakang secara ekonomi, namun data tahun 1977-1978 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jammu dan Kashmir sebesar 34,06% dari total

populasi Jammu dan Kashmir.⁶⁵ Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan yang dimiliki Jammu dan Kashmir menunjukkan betapa terbelakangnya Jammu dan Kashmir dibanding wilayah-wilayah lainnya di dunia ini, namun pada tingkat nasional India angka perolehan menunjukkan bahwa Jammu dan Kashmir termasuk Negara bagian yang tidak mengalami ketimpangan pendapatan yang parah. Apabila dengan nilai pendapatan perkapita untuk tahun 1975 sebesar Rs 825, angka persentase penduduk dibawah garis kemiskinan mengindikasikan bahwa untuk Jammu dan Kashmir pendapatan sebesar Rs 825 ke atas diperkirakan dinikmati oleh kurang lebih 65,04% penduduk dan sekitar 34,06% yang memperoleh pendapatan di bawahnya.

Tabel 3.2 Persentase Populasi Di Bawah Garis Kemiskinan Untuk Daerah Pedesaan Dan Perkotaan Di India Tahun 1977-1978

Negara Bagian /Union Territories	Pedesaan	Perkotaan	Gabungan
1. Andhra Pradesh	43,89	35,68	42,18
2. Assam	52,65	37,37	51,10
3. Bihar	58,91	46,07	57,49
4. Gujarat	43,20	29,02	39,04
5. Haryana	23,25	31,74	24,84
6. Him acal Pradesh	28,12	16,56	27,23
7. Jammu & Kashmir	32,75	39,33	34,06
8. Karnataka	49,88	43,97	48,34
9. Kerala	46,00	51,44	46,95
10. Madhya Pradesh	59,82	48,09	57,73
11. Maharshtra	55,85	31,62	47,71
12. Manipur	30,54	25,48	29,71
13. Meghalya	53,87	18,16	48,03
14. Nagaland	N.A	4,11	4,11
15. Orissa	68,97	42,19	66,40
16. Punjab	11,87	24,66	15,13
17. Rajashtan	33,75	33,80	33,76
18. Tamil Nadu	55,68	44,79	52,12
19. Tripura	64,28	26,34	59,73
20. Uttar Pradesh	50,23	49,24	50,09
21. West Bengal	58,94	34,71	52,54

⁶⁵<https://mypostsblog.wordpress.com/2013/07/02/nasionalisme-etnik-kashmir/diakses tanggal 24 oktober 2015>.

22. Union Territories (seluruhnya)	34,32	17,96	21,69
Seluruh India (dibobotkan)	50,82	38,19	

Sumber: <https://mypostsblog.wordpress.com/2013/07/02/nasionalisme-etnik-kashmir/diakses>

Data yang ada menggambarkan walaupun perkembangan ekonomi di Jammu dan Kashmir tetap dibawah rata-rata India, faktor ekonomi tidaklah cukup kuat dijadikan sebagai sumber penggerak sentiment rakyat Kashmir.

Jika dilihat secara kesejarahan dan kewilayahan. Ekonomi Jammu Kashmir memang lebih terkait dengan Pakistan dibanding dengan India, sebab geografi jalur komunikasi Kashmir terhadap dunia luar lebih terbuka bila melalui wilayah Pakistan. Bahkan sampai kini jalan termudah penghubung wilayah Jammu Kashmir adalah melalui Barat Punjab lewat Sialkot dan Rawalpindi (Pakistan). Pasca partisi India dan Pakistan tahun 1947, pemerintah New Delhi memang membuat jalan penghubung India dengan Jammu melalui Pathankot, tetapi kualitas jalannya masih sangat jelek dan sulit mengingat medannya yang sangat terjal. Oleh karena itu, wilayah Jammu Kashmir sendiri ekonominya lebih bound-up jika menjadi bagian integral Pakistan, mengingat wilayah Pakistan merupakan pintu terpenting bagi Kashmir untuk berhubungan dengan dunia luar. Dan faktor keterkaitan ekonomi Kashmir terhadap Pakistan yang kuat inilah yang akhirnya menjadi penggerak sentimental rakyat Kashmir untuk memisahkan diri dari India dan bergabung dengan Pakistan.⁶⁶

3.3 Kehidupan Sosial Masyarakat Kashmir Di Bawah Pemerintah India

Sebagaimana umumnya kasus-kasus nasionalisme-etnik, kasus separatism di Jammu dan Kashmir juga dilatar belakangi oleh dinamika sosial kontemporer. Dalam kasus Kashmir, nasionalisme-etnik yang ditiupkan oleh penduduk Muslim Kashmir, pada tingkat tertentu bisa dipandang sebagai bentuk ketidakpuasan

⁶⁶Opcit Dhurorudin Mashad hal 38.

mereka terhadap realitas sosial yang dianggap diskriminasi dan merugikan.

Konstitusi India 1950 memberikan kebebasan kepada semua penduduk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang peluknya. Namun di India, antara apa yang tertulis dalam Konstitusi terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Setiap orang termasuk penduduk Muslim memang bebas yang dimaksud hanya sampai pada tingkat pribadi. Begitu aktivitas keagamaan meningkat pada tahap komunal pembatasan-pembatasan yang acap kali dihubung-hubungkan dengan nasionalisme dan sekularisme India, banyak diberlakukan. Aktivitas keagamaan yang paling banyak mendapat pembatasan adalah kegiatan atau ritual yang diperkirakan bersinggungan dengan agama-agama lain, khususnya agama mayoritas (Hindu).

Pemerintah India melakukan pembatasan terhadap tiga kegiatan penting dalam Islam, yaitu dakwah, pelatihan atau pengkaderan, dan pendidikan Islam. Dakwah dibatasi karena dianggap sebagai kampanye terbuka oleh Islam terhadap pemeluk agama lain, khususnya Hindu. Alasan yang sering digunakan untuk membatasi kegiatan ini adalah apabila diperkenankan dilakukan dengan bebas, kegiatan dakwah dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi keras dari pemeluk Hindu yang terlanjur mencurigainya sebagai Islamisasi. Sementara itu kegiatan pelatihan atau pengkaderan dan pendidikan Islam nasional bersifat sekuler yang dikampanyekan pemerintah.

Yang menjadi masalah bagi penduduk Muslim Jammu dan Kashmir adalah praktek-praktek seperti diatas ternyata diseragamkan untuk semua Negara bagian. Bagi penduduk Muslim tidak masuk akal apabila Jammu dan Kashmir, satu-satunya Negara bagian yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak dapat menjalankan aktivitas keagamaannya secara bebas. Penduduk muslim Jammu dan Kashmir menghendaki agar ruang publik yang lebih diberikan kepada mereka. Dengan demikian mereka bisa menjalankan perintah agamanya secara utuh.

Namun Pemerintah India memandang tuntutan yang diajukan penduduk muslim Jammu dan Kashmir sebagai bantahan simbolik terhadap sekularisme India sehingga tidak akan pernah dipenuhi. Keengganan pemerintah India ini yang menyebabkan penduduk Muslim Jammu dan Kashmir merasa tidak ada pilihan lain bagi mereka. Apabila kebebasan menjalankan agama tidak dipenuhi satu-satunya pilihan bagi mereka adalah perpisahan dari India (merdeka atau aksesei dengan Pakistan).

Masalah Bahasa merupakan masalah yang pelik bagi India hingga kini. Persoalan ini muncul ke permukaan manakala pemerintah India pasca kemerdekaan menginginkan memiliki bahasa nasional yang berasal dari bumi India. Di India terdapat sejumlah Bahasa daerah. Diantaranya adalah *Assamese, Bengali, Gujarat, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayan, Marathi, Oriya, Punjab, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telagu*, dan *Urdu*. Masing-masing bahasa ini hidup dan dipakai di satu atau beberapa nagara bagian. Bahasa daerah yang paling banyak dipakai adalah *Hindi*. Bahasa ini dipakai lebih dari sepertiga penduduk India.

Atas dasar jumlah penduduknya, pemerintah india akhirnya menetapkan *Hindi* sebagai bahasa nasional. Sementara itu untuk memudahkan pekerjaan birokrasi yang terlanjur menggunakan bahasa Inggris, sebagian *official language* ditetapkan bahasa Inggris. Dengan penetapan ini maka bahasa *Hindi* dan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Bahasa-bahasa lainnya tetap boleh diajarkan tetapi sebagai mata pelajaran tambahan.

Penetapan bahasa hindi sebagai bahasa nasional oleh kelompok-kelompok etnik lainnya di India dipandang sebagai imperialisme budaya. Penetapan ini dipandang mematikan perkembangan bahasa-bahasa daerah lainnya karena pemakaian Hindi yang meluas dalam segala bidang kehidupan otomatis akan mengurangi pemakaian bahasa setempat.

Bahasa berfungsi sebagai salah satu media untuk mewariskan budaya. Oleh Karen itu, keharusan menggunakan bahasa Hindi juga dipandang oleh kelompok etnik lain sebagai upaya mematikan budaya mereka.

Bagi penduduk Muslim Jammu Kashmir, penyeragaman bahasa dianggap

sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Dalam pandangannya mereka mengharuskan memakai Hindi akan mengakibatkan penduduk Muslim Jammu dan Kashmir dalam beberapa generasi berikutnya akan kehilangan salah satu identitas *Kashmiriyat* yaitu bahasa *Kashmiri*.

Bagi penduduk Muslim Jammu dan Kashmir, *Kashmiri* bukan sekedar bahasa. Ia berperan penting dalam pewarisan nilai-nilai Islam karena menjadi bahasa pengantar dalam berbagai kegiatan keagamaan. Mengingat peran penting ini maka penyeragaman bahasa yang dilakukan pemerintah India juga dipandang penduduk Muslim Jammu dan Kashmir sebagai upaya menggerogoti identitas Islam secara tidak langsung.

Berbagai diskriminasi yang dilakukan India terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim di Kashmir menjadi salah satu alasan kuat untuk Kashmir memisahkan diri dari India dan bergabung dengan Pakistan.

BAB 5. KESIMPULAN

Sejak lepas dari penjajahan Inggris tahun 1947, wilayah Kashmir telah menjadi sumber konflik antara India dan Pakistan. Ketegangan antara kedua negara sering menimbulkan bentrokan bersenjata yang membuat stabilitas keamanan regional terancam. Masing-masing mengklaim bahwa Kashmir adalah bagian dari kekuasaannya. Pakistan berdalih bahwa dengan menguasai Kashmir berarti melindungi kaum Muslim yang bermukim di situ.

Konflik antara India dan Pakistan terkait masalah Kashmir membuat PBB akhirnya turun tangan. PBB melalui komisi UNCIP mengeluarkan resolusi yang fundamental terkait Kashmir yakni tanggal 13 Agustus 1948 yang menghendaki terjadinya plebisit di negara bagian Jammu dan Kashmir, sehingga status Kashmir selanjutnya ditentukan oleh masyarakat Kashmir sendiri. Sedangkan resolusi 5 Januari 1949 berisi tentang adanya Line of Control (LoC) atau garis yang memisahkan tentara kedua negara sepanjang 1300km, sehingga 2/3 wilayahnya dikuasai India dan 1/3 lainnya dikuasai Pakistan.

Penguasaan 1/3 wilayah Kashmir oleh Pakistan tidak membuat Pakistan merelakan 2/3 wilayah Kashmir menjadi bagian dari India. Pakistan melakukan serangkaian upaya untuk merebut Kashmir dan menjadikannya sebagai bagian dari wilayahnya. Dalam upayanya menjadikan Kashmir sebagai bagian wilayahnya, Pakistan melakukan upaya subversi terhadap India.

Upaya subversi tersebut dilakukan melalui 2 cara, yakni strategi tindakan sistematis dan strategi propaganda sistematis. Strategi tindakan sistematis melalui provokasi militer dan pemberian bantuan dana dan senjata kepada kelompok pemberontak. Pakistan melalui provokasi militernya berusaha mengusir tentara India dari kawasan Kashmir dan upaya tersebut juga dimaksudkan agar isu mengenai Kashmir menjadi isu internasional sehingga mendorong PBB untuk menepati janjinya untuk melaksanakan plebisit di wilayah Kashmir. Pemberian bantuan dana dan senjata Pakistan terhadap kelompok pemberontak dimaksudkan

untuk memerangi tentara India tanpa harus menerjunkan tentara Pakistan langsung, selain itu upaya tersebut dimaksudkan menarik hati masyarakat Kashmir bahwa Pakistan sebagai negara Islam yang bertetangga dengan wilayah Kashmir sangat peduli dengan penderitaan masyarakat Kashmir dan berusaha melindungi mereka dari kekejaman India.

Strategi propaganda sistematis yang dilakukan melalui 3 media yakni pendidikan, media massa dan hiburan dimaksudkan untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap pemerintah India sehingga menimbulkan gerakan anti-India. Dengan adanya opini negatif terhadap India, Pakistan berharap bahwa tindakannya dalam merebut Kashmir direstui oleh masyarakat, baik masyarakat dalam negeri Pakistan, masyarakat internasional atau bahkan masyarakat Kashmir itu sendiri.

Kedua cara yang dilakukan oleh Pakistan tersebut dimaksudkan untuk mendorong PBB menepati janjinya melaksanakan plebisit di wilayah Kashmir. Selain itu upaya tersebut dimaksudkan untuk merebut dukungan masyarakat Kashmir agar kelak ketika PBB melaksanakan janjinya untuk melakukan plebisit di Kashmir, masyarakat Kashmir memilih untuk bergabung dengan Pakistan dibandingkan membentuk negara sendiri ataupun bergabung dengan India.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa upaya subversi yang dilakukan Pakistan untuk merebut dukungan masyarakat Kashmir telah berhasil. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok pemberontak dan masyarakat lokal Kashmir yang memiliki kecenderungan untuk memilih bergabung dengan Pakistan. Kecenderungan masyarakat Kashmir untuk bergabung dengan Pakistan disadari oleh pemerintah India, maka dari itu India selalu menolak untuk dilaksanakannya plebisit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dhurorudin Mashad. 2004. *Kashmir Derita Yang Tak Kunjung USai*. Khalifa. Jakarta Utara.

Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Sofyan Naim, *Hubungan India-Pakistan Pada Era Ketegangan Negara Adi Kuasa*, IKIP Padang, Padang, 1990,

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka DEPDIKNAS. Hal. 565

Tuti Nuriah. 1990. *Asia Selatan Dalam Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

JURNAL:

Chairul aftah. 2005. Studi tentang Posisi Kashmir dalam Hubungan India-Pakistan. *Jurnal Sosial Budaya dan Politik, Universitas Mulawarman*.

Ita Mutiara. 2006. Dilema masalah Kashmir dalam Kerangka Hubungan India-Pakistan: *Mozaik volume.1*.

Irmawan Effendi, "Kashmir Dalam Hubungan India-Pakistan: Perspektif Kebijakan Nuklir Pakistan, Latar Belakang dan Perkembangan Menuju Penyelesaian Konflik," *Jurnal Siklus*, Vol. 1, No. 3 (2005)

Muhammad Rashid Khan, "The Kargil Conflict: Comparing Indian and Pakistani Newspapers' Editorial Treatment," *South Asian Studies*, Vol. 23, No. 2 (2008).

Suyani Indriastuti. 2008. Kompleksitas Konflik Kashmir India dan Pakistan. *Jurnal Sosial Budaya dan Politik*, :Universitas Jember.

Suyani Indriastuti.2004. Rivalitas antara India Dan Pakistan dalam Konflik Kashmir di Bidang Militer. Tidak Dipublikasikan. *Skripsi. Jember: Universitas Jember*.

INTERNET

"Here is What 70% of Student Populations in Pakistan Study," <http://acounterterror.wordpress.com/here-is-what-70-of-student-population-in-pakistan-study/> (diakses tanggal 14 Maret 2014).

"India: Pasukan Pakistan Serang Pos Perbatasan," http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30319:india-pasukan-pakistan-serang-pos-perbatasan-&catid=58:internasional&Itemid=213 (diakses tanggal 16 Maret 2014)

"India: Sepanjang 2013 ada 196 pelanggaran gencatan senjata di Kashmir," <http://international.sindonews.com/read/2013/12/20/40/818897/india-sepanjang-2013-ada-196-pelanggaran-gencatan-senjata-di-kashmir> (diakses tanggal 17 Maret 2014).

"Links between ISI, militant groups: Straw," <http://www.rediff.com/news/2002/jun/11war4.htm> (diakses tanggal 16 Maret 2014).

“Militer India-Pakistan Saling Tembak di Perbatasan Kashmir,” <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/12/mszyv0-militer-indiapakistan-saling-tembak-di-perbatasan-kashmir> (diakses tanggal 16 Maret 2014)

Muchlisin Ali, “Perbandingan Pendidikan di Negara Pakistan,” <http://inmuchlis.blogspot.com/2012/02/perbandingan-pendidikan-di-negara.html> (diakses tanggal 14 Maret 2014)

Narender Sehgal, “Pakistan’s ISI and Kashmiri Terrorist,” <http://www.kashmir-information.com/ConvertedKashmir/Chapter29.html> (diakses tanggal 16 Maret 2014).

“Pakistan dan India terlibat baku tembak di Kashmir,” <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/07/msr1rq-pakistan-dan-india-terlibat-baku-tembak-di-kashmir> (diakses tanggal 17 Maret 2014).

“Pakistan's Role in the Kashmir Insurgency,” <http://www.rand.org/commentary/2001/09/01/JIR.html> (diakses tanggal 16 Maret 2014).

“Pakistan's ISI sponsors Kashmiri militant groups: FBI,” <http://www.dnaindia.com/world/report-pakistans-isi-sponsors-kashmiri-militant-groups-fbi-1568064> (diakses tanggal 16 Maret 2014).

“Pakistan’s Schools Teach Hindu Hatred,” <http://www.dawn.com/news/672000/pakistan-schools-teach-hindu-hatred> (diakses tanggal 14 Maret 2014).

“Pakistani Textbook: “Previously, India was Part of Pakistan,”
<http://www.jihadwatch.org/2008/12/pakistani-textbook-previously-india-was-part-of-pakistan>

“Pakistan papers apologise after running anti-India fake WikiLeaks cables,”
<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Pakistan-papers-apologise-after-running-anti-India-fake-WikiLeaks-cables/articleshow/7075670.cms> (diakses tanggal 14 Maret 2014).

“Pak channels banned for anti-India agenda,”
<http://indiatoday.intoday.in/story/Pak+channels+banned+for+anti-India+agenda/1/94621.html> (diakses tanggal 14 Maret 2014).

“Pakistani film Waar shows India as cause of nation’s problems,”
<http://www.hindustantimes.com/world-news/pakistani-film-waar-shows-india-as-cause-of-nation-s-problems/article1-1136151.aspx> (diakses tanggal 15 Maret 2014).

“Pakistani Action Movie Draws Money, Controversy,”
<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304069604579157851266747652> (diakses tanggal 15 Maret 2014).

“Slumdog Millionaire,” http://en.wikipedia.org/wiki/Slumdog_Millionaire
(diakses tanggal 15 Maret 2014).

“Slumdog Millionaire: A Biased and Disturbing Anti-Hindu Movie,”
<http://www.chakranews.com/slumdog-milionaire-its-my-favourite-movie-too/628>

“So what if ISPR funded ‘Waar’?”, <http://tribune.com.pk/story/620454/so-what-if-ispr-funded-waar/> (diakses tanggal 15 Maret 2014).

“Tentaranya Tewas, Giliran Pakistan Panggil Dubes India,” <http://news.detik.com/read/2013/01/11/163850/2139925/1148/tentarnya-tewas-giliran-pakistan-panggil-dubes-india> (diakses tanggal 17 Maret 2014).

UNESCO, “Education in Pakistan,” http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/EDUCATION_IN_PAKISTAN_A_FACT_SHEET.pdf (diakses tanggal 14 Maret 2014)
<https://mypostsblog.wordpress.com/2013/07/02/nasionalisme-etnik-kashmir/> diakses tanggal 24 oktober 2015.